

**POLRES KOTAWARINGIN BARAT
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTAR SUKUBANGSA
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Arief Sulistyanto

Pendahuluan

Tulisan ini bermaksud menunjukkan kegiatan operasional Polres Kotawaringin Barat yang berhasil dalam menangani konflik dan meredam potensi konflik antar suku bangsa yang berdarah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada awal tahun 2001. Konflik antar suku Madura dan non Madura (khususnya suku Dayak) yang berawal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) telah merebak ke wilayah lain di sekitarnya yaitu di Pontianak, Kuala Kapuas dan Kota Waringin Barat yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan korban jiwa serta eksodus suku Madura ke luar wilayah Kalimantan Tengah untuk mengungsi di wilayah lain yang lebih aman. Kotawaringin Barat sebagai kabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur telah terkena dampak kerusuhan akibat konflik yang terjadi yaitu dengan terjadi ketegangan diantara warga suku Madura dan non Madura walaupun belum sempat memuncak dan pecah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah sekitarnya namun demikian sebanyak : 20.177 orang atau separuh dari jumlah penduduk Madura telah mengungsi atau diungsikan. Keadaan ini merupakan potensi terjadinya konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik oleh aparat keamanan dan pihak lain yang terkait.

Polres Kotawaringin Barat sebagai Kesatuan Operasional Dasar Polri di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tanggung jawab yang cukup berat untuk menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman masyarakat dalam menghadapi konflik tersebut. Polres tidak akan mungkin mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bila tidak dilakukan secara integral instansional bersama-sama dengan jajaran Muspida dan aparat lain yang terkait. Hal ini telah dilakukan dengan baik sehingga konflik yang terpendam antara suku Madura dan non Madura di Kabupaten Kotawaringin Barat tidak termanifestasi menjadi kerusuhan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat tersebut akan diuraikan secara singkat sebagai gambaran

terhadap pola penanganan konflik antar sukubangsa yang secara potensial mungkin saja dapat terjadi di wilayah Indonesia yang lainnya.

Polres Kotawaringin Barat

Polres Kotawaringin Barat sebagai sebuah Kesatuan Operasional Dasar merupakan basis operasional Polri yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan memberikan rasa aman bagi warga masyarakatnya. Secara struktural Polres Kotawaringin Barat berada dibawah kendali Kapolda Kalimantan Tengah, terdiri dari 9 Kepolisian Sektor / Polsek (Polsek Kumai, Polsek Sukamara, Polsek Kotawaringin Lama, Polsek Arut Utara, Polsek Nanga Bulik, Polsek Balai Riam, Polsek Kuala Jelai, Polsek Lamandau, Polsek Delang): 9 Pos Polisi / Pospol (Pospol KP3 Pangkalan Buun, Pospol KP3 Kumai, Pospol KP3 Jelai, Pospol Semanggang, Pospol Pangkalan Lada dan Pos Pol Arut Selatan). Jumlah Polsek yang ada tersebut belum sesuai dengan jumlah kecamatan karena masih terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki Polsek.

Jumlah Personil Polres Kotawaringin Barat sebanyak 344 orang atau hanya 67% dari data personil (DSPP) yang seharusnya berjumlah 588 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 261.360 jiwa maka perbandingan polisi dan masyarakat adalah 1 : 750. Ratio ini telah memenuhi rencana ratio Polri dalam proyeksi pembangunan personil Polri tahun 2005, tetapi bila dibandingkan dengan luas wilayah yang harus *cover* oleh Polres sangat luas dan medan yang sulit dijangkau ditambah dengan terbatasnya sarana mobilitas petugas maka sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan Polri terhadap masyarakat.

Sebagai bagian dari Administrasi Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat Kapolres bertindak selaku anggota Muspida Kabupaten Kotawaringin Barat dibawah koordinator Bupati Kotawaringin Barat. Muspida kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya Polres mewujudkan keamanan dan memberikan rasa aman masyarakat. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh kepemimpinan Kapolres dan Bupati yang dapat saling menjaga dan menumbuhkan sikap kerjasama dan saling pengertian antara jajaran Muspida lainnya. Seperti dalam penanganan konflik yang terjadi Kotawaringin Barat Bupati sebagai penguasa daerah diberikan peran sebagai koordinator untuk mengkoordinir seluruh jajaran Muspida di kabupaten Kotawaringin Barat, dengan cara demikian operasionalisasi komando dan kendali pasukan / personil dalam pelaksanaan operasi pengamanan dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih komando. Seperti halnya dalam operasi

penanganan konflik pasukan TNI yang berada di bawah Komando Dandim di BKO-kan kepada Polri, bilamana Polri memerlukan pasukan maka Kapolres tidak langsung meminta kepada Dandim, tetapi permintaan tersebut disalurkan melalui Bupati sebagai Koordinator dan Bupati baru meminta kepada Dandim untuk dikerahkan pasukannya kepada Polri. Dengan cara demikian maka dapat menghilangkan sikap egoisme instansi dan menciptakan saling pengertian. Yang lebih penting dengan diberikannya kewenangan dan tanggung jawab kepada Bupati tersebut maka kebutuhan operasi pengamanan yang menyangkut dana operasi, sarana dan prasarana yang diperlukan akan mendapat dukungan juga dari Bupati disamping yang sudah diberikan oleh kesatuan masing-masing.

Mekanisme demikian ini sangat efektif dalam pelaksanaan koordinasi operasi yang Pos Komandonya ditempatkan di Polres karena keterpaduan, kesamaan persepsi dan tindakan yang *komperhensif* bisa dicapai dengan baik. Oleh karena itu dalam penanganan konflik antar suku bangsa di kabupaten Kotawaringin Barat berjalan dengan baik karena tumbuhnya kerjasama dan motivasi dari masing-masing Pimpinan daerah untuk bekerja keras demi keamanan dan keselamatan masyarakatnya.

Situasi dan Kondisi Kabupaten Kotawaringin Barat

Luas wilayah kabupaten Kotawaringin Barat +/- 21.000 km² yang meliputi hutan, rawa dan sungai terletak pada garis 3° 52' 34" sampai 5° 13' 26" bujur Timur dan 1° 18' 35" sampai 3° 36' 59" lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat.

Jalur perhubungan antar daerah yang utama adalah dengan sarana angkutan sungai untuk menjangkau wilayah kecamatan, sehingga merupakan jalur perekonomian yang sangat dominan dimana terdapat 26 sungai yang dilayari dan dapat menjangkau sampai daerah pedalaman / pelosok kecamatan. Transportasi melalui laut hanya terbatas antar propinsi yang dapat ditempuh melalui pelabuhan sungai di Kumai dengan tujuan Surabaya dan Semarang, demikian pula pendatang dari Surabaya / Semarang yang datang ke Pangkalan Bun akan mendarat di pelabuhan sungai di Kumai, sehingga pelabuhan Kumai

merupakan pintu gerbang masuk pendatang dari jalur laut ke Pangkalan Bun. Sedangkan jalur transportasi udara dapat ditempuh melalui Bandar Udara Iskandar yang melayani penerbangan dari Pangkalan Bun tujuan Semarang dan Pangkalan Bun Palangka Raya dengan pesawat domestik Merpati Airline, untuk menghubungkan kota-kota lain di wilayah Kalteng dapat ditempuh dengan pesawat-pesawat yang lebih kecil yang saat ini untuk sementara waktu sedang tidak beroperasi. Sedangkan transportasi darat sudah dapat dikatakan lancar untuk jalur Pangkalan Bun – Sampit – Palangka Raya, walaupun masih terdapat beberapa ruas jalan yang kondisinya cukup memprihatinkan dimana terdapat jalan dalam kondisi rusak antara Pangkalan Bun – Sampit sepanjang 50 km sehingga dapat menghambat transportasi melalui darat.

Jumlah penduduk Kotawaringin Barat dari data sensus terakhir adalah sebesar 231.729 jiwa yang terdiri dari 117.756 jiwa laki-laki dan 113.973 jiwa perempuan, bila dilihat dari jumlah KK maka terdapat 41.428 KK dimana 14.233 KK adalah transmigran yang berasal dari NTT, NTB, Jatim, Jateng, Jabar, Bali, DKI dan DIY, sedangkan sisanya sebesar 27.195 KK terdiri dari penduduk asli pendatang yang bukan transmigran. Penduduk kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari beberapa suku bangsa yaitu 1) Dayak, 2) Melayu Mendawai, 3) Banjar, 4) Sunda, 5) Jawa, 6) Madura, 7) Batak, 8) Bali, 9) NTT, 10) Bugis, 11) Tionghoa (WNI), 12) Arab (WNI). Sedangkan dilihat dari agama yang dianutnya maka komposisinya adalah sebagai berikut : 1) Islam : 79,03%, 2) Kristen : 7,97%, 3) Katolik : 1,88%, 4) Kaharingan : 10,84%, 5) Budha : 0,28%. Komposisi penduduk dilihat dari segi mata pencaharian dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Petani 31%, 2) Pegawai Negeri : 6,3%, 3) Swasta : 20,4%, 4) TNI/Polri : 0,4%, 5) Pelajar : 23,4%, 6) Rumah tangga : 14%, 7) lain-lain : 4,6% (*sumber data dari laporan kesatuan Polres Kobar*).

Dari data demografi tersebut terlihat bahwa penduduk kabupaten Kotawaringin Barat merupakan masyarakat yang heterogen terdiri dari beberapa sukubangsa yang datang dari beberapa daerah dari luar Kalimantan Tengah. Heterogenitas penduduk ternyata tidak disertai dengan pembauran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena dalam kenyataannya terjadi pengelompokan domisili antar suku seperti misalnya suku Madura hidup berkelompok di desa Madurejo, Suku Melayu / Banjar hidup di desa Mendawai, suku Jawa di desa Sidorejo. Keadaan ini memang dapat memperkuat solidaritas kesukubangsaan mereka yang semakin memperkuat ikatan primordialisme kesukubangsaannya.

Seharusnya dalam masyarakat yang heterogen (*plural society*) didorong untuk melonggarkan batas-batas sukubangsa dan rasial yang dipagari' oleh

kebudayaan masing-masing sukubangsa yaitu dengan cara dapat saling berhubungan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial sehari-hari dan melalui pendidikan disekolah yang bertujuan untuk saling memahami kebudayaan-kebudayaan sukubangsa mereka yang saling berbeda sehingga melalui pemahaman ini stereotip dan prasangka dapat dihilangkan dan perasaan persaudaraan dalam kesederajatan dapat dibangun dan dikembangkan (Suparlan, 2003). Dengan terjadinya pengelompokkan kehidupan antar suku bangsa tersebut maka potensi terjadinya konflik sangat besar ketika terjadi interaksi antar sukubangsa dalam masyarakat pasar, apalagi dalam upaya persaingan sumberdaya yang diperebutkan dilakukan dengan menggunakan cara-cara kebudayaan kesukubangsanya yang bertentangan dengan budaya masyarakat lokal setempat, hal inilah yang menimbulkan sentimen negatif antar sukubangsa yang dapat mencuat menjadi konflik antar sukubangsa.

Konflik antar Suku Madura dengan Non Madura di Kabupaten Kotawaringin Barat

Konflik antar sukubangsa yang terjadi di Kotawaringin Barat adalah akibat dari konflik Dayak – Madura yang terjadi di daerah lain dalam Propinsi Kalimantan Tengah yaitu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit), Palangka Raya dan Kuala Kapuas. Keadaan yang dirasakan oleh masyarakat non Madura di kabupaten Kotawaringin Barat pada umumnya hampir sama dengan warga masyarakat di daerah lain. Banyak sekali sikap dan perilaku dalam hubungan antar suku Madura dengan non Madura yang dinilai tidak menghormati sesama warga masyarakat dan mau menang sendiri dalam pergaulan sehari-hari. Beberapa contoh perilaku seperti yang disampaikan oleh beberapa warga non Madura dan laporan tertulis dalam buku *Usulan Penyelesaian Jalan Tengah-Islah / Rekonsiliasi dari Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah*, LKMMDD-Kalteng dalam kehidupan sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat. Perilaku tersebut sebenarnya hanya dilakukan oleh beberapa oknum orang Madura tetapi digeneralisir bahwa seluruh orang Madura berperilaku sama, padahal cukup banyak orang Madura yang telah melakukan perkawinan campuran / asimilasi dengan warga setempat dan telah turun temurun selama tiga generasi berada di Kalimantan Tengah. Warga suku Madura seperti ini sebagian besar sudah tidak memiliki hubungan dengan orang Madura di tanah asalnya karena keluarganya telah berada di Kalimantan Tengah sehingga ketika terjadi pengungsian mereka tidak memiliki tujuan yang akhirnya terkatung-katung mungkin sampai saat ini. Beberapa contoh konflik yang sering terjadi dalam hubungan antar suku Madura dan Non Madura adalah sebagai berikut :

- Pedagang di pasar, bila ada pembeli yang menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan maka pedagang asal Madura tersebut marah-marah dengan mengatakan "Kalau tidak punya uang tidak usah belanja" atau bila pedagang sayur mengatakan "Kalau mau dapat murah, tanam saja sendiri!", perkataan pernah dialami oleh istri Bupati Kotawaringin Barat yang sedang berbelanja di pasar.

- Tukang becak / ojek, bila telah ada kesepakatan dengan penumpang tentang ongkos yang diminta untuk menuju kesuatu tempat, misalnya sebesar : Rp. 2.000,-, maka setelah tiba di tempat yang dituju tukang becak atau ojek tersebut minta ongkos yang lebih banyak menjadi Rp. 10.000,-, dengan mengatakan "*Jaoh pak, capek, tambah ongkosnya*", bila permintaan ini tidak dituruti maka tukang becak / ojek tersebut akan marah dan mengancam membacok penumpang tersebut dengan clurit (*kasus seperti ini banyak disampaikan oleh warga di Sampit, Pangkalan Bun dan Kuala Kapuas*).

- Pinjam / sewa tanah, orang Madura pendatang ada yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam, tetapi mereka tidak memiliki tanah untuk berkebun / bersawah, bila mereka menginginkan tanah yang akan digarap maka menemui pemiliknya dengan cara sopan memohon agar dapat meminjam tanahnya untuk bertani. Karena sifat orang Dayak yang suka menolong dengan pemikiran daripada tanahnya menganggur maka dengan senang hati orang Dayak pemilik tanah tersebut meminjamkan tanahnya kepada orang Madura dengan surat perjanjian diatas kertas segel tanpa dimintai biaya sewa dengan dibuat. Dengan tanah pinjaman orang Madura tersebut membangun rumah dan bercocok tanam, dari tahun ke tahun. Lama kelamaan timbul perilaku tidak terpuji dari orang Madura ini, dimana tanpa sepengetahuan pemiliknya rumah tersebut ditawarkan untuk dijual kepada orang lain, mendengar hal ini pemilik tanah menegur orang Madura tersebut yang menjawab dengan marah dan mengancam dengan clurit, sehingga timbul sengketa pertanahan antara orang Dayak dan Madura yang diselesaikan secara musyawarah di kantor Kepala Desa dengan kesepakatan orang Madura tersebut akan diberi waktu 3 tahun lagi untuk menempati tanah tersebut. Tetapi dengan adanya konflik etnis maka orang Madura tersebut mengungsi dan meninggalkan rumah dan tanah yang dipinjamnya. Karena sudah ditinggalkan oleh orang Madura maka pemilik tanah akan mengambil alih tanahnya untuk digarap sendiri, ternyata tanah tersebut telah disewakan lagi oleh orang Madura kepada

pendatang dari Jawa tanpa sepengetahuan pemiliknya. (*kasus ini terjadi di desa kandang Kecamatan Kota Besi Kabupaten Sampit*).

Berbagai bentuk konflik yang terjadi tersebut menjadikan masyarakat Non Madura menjadi semakin tertekan oleh perilaku oknum suku Madura yang sangat potensial sekali pecah menjadi konflik terbuka yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dengan pecahnya konflik di kabupaten lain maka kondisi kehidupan masyarakat di Kotawaringin Barat baik suku Madura maupun suku Non Madura menjadi semakin resah karena diliputi perasaan khawatir pecahnya konflik seperti yang terjadi di daerah lain yang menelan korban cukup banyak baik jiwa maupun harta benda.

Situasi ini menjadi semakin menghangat bahkan memanas dengan semakin seringnya beredar rumor yang memprovokasi masyarakat Dayak untuk melakukan tindakan penyerangan terhadap suku Madura. Menyikapi kondisi masyarakat yang demikian ini maka Polres Kotawaringin Barat melakukan patroli dan melakukan komunikasi dengan kelompok-kelompok suku bangsa yang ada untuk dapat bertindak sebagai mediator dan fasilitator diantara warga sukubangsa sehingga dapat tercipta komunikasi antara aparat kepolisian dengan warga sukubangsa disamping itu juga bertindak sebagai mediator sukubangsa Madura yang sedang dalam masalah konflik. Guna menampung setiap keluhan warga masyarakat maka Polres membuka Posko pelayanan informasi selama 1 x 24 jam yang melibatkan berbagai instansi sehingga bilamana diperlukan tindakan dapat dilakukan secara terpadu. Dengan cara demikian maka tindakan yang dilakukan dapat efektif.

Orang-orang Madura yang takut terhadap perkembangan situasi yang semakin mengkhawatirkan tersebut segera meninggalkan Kotawaringin Barat untuk mengungsi ke pulau Jawa. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2001 jumlah pengungsi yang telah meninggalkan Kotawaringin sebanyak 20.177 orang yang sebagian besar adalah orang-orang Madura pendatang, termasuk para preman yang sering membuat keresahan warga masyarakat, sedangkan sisanya sebanyak 20.433 orang masih bertahan di Kotawaringin Barat, adalah orang-orang Madura yang telah tiga generasi menetap di Kotawaringin Barat. Walaupun demikian mereka masih diliputi perasaan khawatir terhadap pecahnya konflik di wilayah Kobar dan mereka bersikap pasrah terhadap situasi ini dengan menyerahkan pengamanan kepada aparat keamanan. Untuk menangani masalah pengungsi ini Polres bersama Muspida telah melakukan langkah-langkah koordinatif secara terpadu dalam upaya pemulangan pengungsi.

Penyiapan kendaraan truk di Mapolres yang setiap saat dapat digerakkan untuk mengangkut dan mengevakuasi pengungsi di tempat yang aman bilamana terjadi perkembangan situasi konflik yang mengkhawatirkan.

Disisi lain bagi warga non Madura khususnya suku Dayak masih diliputi kekhawatiran terhadap serangan dari orang-orang Madura yang ingin membalas dendam akibat konflik yang terjadi, sehingga diantara mereka menyatakan 50% siap perang dan 50% siap berdamai. Kondisi ini menimbulkan ketidak tenangan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang harus bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Penerapan patroli gabungan antara aparat keamanan dan instansi terkait dengan melibatkan anggota masyarakat dari tiap warga sukubangsa selama 24 jam sangat efektif untuk meredam potensi konflik yang terpendam. Dengan pelibatan warga antara sukubangsa dalam pelaksanaan patroli juga digunakan sebagai sarana komunikasi antar warga sukubangsa sehingga akan dapat saling mengenal dan memahami kondisi dan perasaan dari masing-masing sukubangsa yang merupakan sarana yang efektif untuk disebar luaskan kepada warga sukubangsanya bahwa diantara mereka dapat bekerja sama dan saling pengertian.

Kondisi Kotawaringin Barat sampai dengan hari Senin tanggal 26 Maret 2001, masih dalam keadaan aman dan terkendali, hal ini ditandai dengan masih berlangsungnya aktivitas masyarakat baik di pasar, pertokoan, dan pusat-pusat perbelanjaan di kota Pangkalan Bun, kegiatan pelajar ke sekolah semuanya berjalan sebagaimana biasanya. Menjelang peringatan Tahun Baru Hijriah (1 Muharam) yang jatuh pada hari Senin tanggal 26 Maret 2001, pada hari Minggu malam tanggal 25 Maret 2001 berlangsung acara tradisi keagamaan masyarakat pemeluk agama Islam melakukan pawai berjalan kaki keliling kota seperti melakukan takbiran menjelang Idul Fitri, yang berlangsung secara aman dan damai.

Untuk menumbuhkan rasa keadilan diantara sesama warga sukubangsa dan menghilangkan kesan polisi bertindak memihak dalam penegakkan hukum yang dapat dijadikan isu untuk menimbulkan konflik antar sukubangsa maka dalam setiap penanganan perkara pidana yang terjadi dilakukan secara transparan dengan menginformasikan hasil penyidikan kepada masyarakat melalui media massa maupun langsung kepada pihak-pihak yang berperkara. Dalam hal-hal tertentu dalam melakukan upaya paksa terhadap warga sukubangsa yang terlibat konflik dengan warga sukubangsa lainnya, Polres mengikut sertakan tokoh dari warga sukubangsa yang terlibat untuk ikut menyertai / menyaksikan polisi

dalam melakukan tindakan, langkah ini dalam kondisi yang diliputi oleh suasana curiga dan potensi konflik yang terpendam ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan obyektivitas Polri dalam menyelesaikan setiap tindak pidana yang terjadi sehingga tidak dijadikan komoditas isu yang menebarkan konflik.

Keadaan kota Pangkalan Bun sesuai dengan fakta yang terjadi dalam keadaan aman dan tenang, tetapi berkembang informasi ditengah-tengah masyarakat adanya pemberitaan terhadap suatu peristiwa yang sensasional yang bertolak belakang dengan fakta tersebut, dimana seolah-olah terjadi kerusuhan di Pangkalan Bun. Hal ini justru dapat menimbulkan keresahan masyarakat yang sebagian besar sangat menyayangkan pemberitaan yang nyata tidak benar, bahkan mereka meminta aparat pemerintah agar memberikan perhatian dan penanganan terhadap arus informasi yang berkembang. Kondisi ini sangat rawan dan sangat menghambat berbagai upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah bersama-sama dengan segenap tokoh masyarakat, untuk meredam dan mencegah meletusnya konflik di Kotawaringin Barat. Media massa memiliki peranan sangat besar yang diperlukan dan harus lebih aktif untuk memberikan informasi yang menyejukkan masyarakat demi terciptanya perdamaian dan ketenangan.

Penanganan Konflik antar Suku Bangsa

Konflik antar sukubangsa Dayak dan Madura yang terjadi di Kalimantan Tengah yang diawali dari Kabupaten Sampit, menjadi pemicu meluasnya konflik di Palangkaraya dan Kuala Kapuas yang memang telah memendam rasa ketidakpuasan terhadap orang-orang Madura yang telah terakumulasi. Demikian halnya dengan yang terjadi di Pangkalan Bun, tidak terlepas dari pengaruh konflik tersebut yang mengakibatkan terjadi perasaan ketakutan baik dari warga Madura maupun sukubangsa yang lainnya. Namun bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang telah terjadi konflik maka kabupaten Kotawaringin Barat dapat dikatakan relatif terkendali dalam arti tidak terjadi ledakan konflik yang besar walaupun terjadi gejolak sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perasaan kekhawatiran timbulnya konflik seperti di daerah lainnya. Kondisi ini terjadi berkat penanganan konflik yang dilakukan dengan baik integratif dan terkoordinasi dengan baik antara aparat keamanan, Muspida dan segenap kelompok masyarakat sehingga mampu mengeliminir terjadinya konflik yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Untuk memudahkan dalam

penguraian penanganan konflik yang dilakukan oleh Polres Kotawaringin Barat maka akan dibagi dalam empat tindakan yaitu *Koordinatif, Preemtif, Preventif,* dan *Represif*.

1. Koordinatif

Terjadinya konflik di Kalimantan Tengah telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks karena mengganggu berbagai segi kehidupan masyarakat baik keamanan, kesejahteraan maupun ketentraman. Oleh karena itu dalam penanganan permasalahan yang sangat kompleks tersebut harus dilakukan pendekatan dari berbagai sisi, tidak hanya dari aspek keamanan saja, salah satu hal yang perlu dicatat terhadap keberhasilan Polres Kotawaringin Barat dalam penanganan konflik yang terjadi adalah adanya koordinasi dan kerjasama yang sangat baik dan kompak antar Muspida dan Muspida dengan segenap komponen masyarakat, sehingga penanganan konflik dapat dilakukan dengan cepat, efektif dan tuntas. Berbagai bentuk langkah koordinatif tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu :

a. Pembentukan Pos Koordinasi Muspida

Untuk mewujudkan kesatuan langkah yang komprehensif dalam menangani konflik maka dibentuk Pos Koordinasi Muspida kabupaten Kotawaringin Barat di Polres Kotawaringin Barat dengan menggunakan kantor Kapolres sebagai *Operation Room* untuk menganalisis setiap perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dan merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Bupati sebagai Kepala wilayah berperan sangat baik dalam mengkoordinir anggota Muspida sehingga menciptakan iklim kerjasama yang harmonis diantara pejabat dalam Muspida dan menghilangkan egosentrisme instansional. Hal yang penting dengan langkah seperti ini adalah terjadinya komunikasi yang efektif diantara para pejabat sehingga mempersingkat jalur birokrasi sehingga setiap keputusan yang diambil oleh Muspida dapat segera dioperasikan oleh masing-masing instansi secara proporsional dan koordinatif. Kecepatan dalam pengambilan keputusan dan operasionalisasi tindakan untuk penyelesaian masalah sangat diperlukan karena dalam situasi konflik yang terjadi seperti ini aparat harus berlomba dengan perkembangan informasi yang kadang-kadang memprovokasi warga masyarakat yang dapat menyulut terjadinya konflik.

Berbagai inovasi dan kreatifitas pemikiran dalam penyelesaian setiap permasalahan yang terjadi harus dilakukan disesuaikan dengan situasi yang dihadapi dengan tetap berpedoman pada ketentuan operasional yang ada. Setiap Kepala Kesatuan (Kapolres) harus mampu menjabarkan berbagai kebijakan pimpinan yang bersifat umum dan strategis kedalam kebijakan teknis sesuai dengan karakteristik masyarakat dan masalah yang terjadi di wilayahnya. Karena dalam setiap kegiatan pemolisian diharapkan tindakan kepolisian dapat memenuhi harapan dari masyarakatnya (*public expectation*) terhadap keberadaan polisi dalam masyarakat. Dengan memahami masalah yang dihadapi oleh masyarakat maka akan dapat merumuskan penyelesaiannya melalui serangkaian langkah-langkah manajerial sehingga tindakan yang dilakukan dapat efektif dan efisien (Buttler. AJP : 1992).

b. Pembentukan Posko Penanggulangan Krisis

Untuk memonitor setiap perkembangan situasi yang terjadi dan memberikan penerangan serta menetralsir terhadap berbagai informasi yang provokatif maka dibentuk Posko Penanggulangan Krisis di Polres Kotawaringin Barat, yang memberikan pelayanan selama 24 jam. Posko tersebut terdiri dari gabungan personil dari berbagai instansi di kabupaten Kotawaringin Barat. Tugas Posko ini adalah menerima setiap pengaduan masyarakat, mengambil tindakan dengan segera serta memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukannya. Untuk menunjang kecepatan bertindak dalam penyelamatan warga khususnya suku Madura yang akan dievakuasi ke pengungsian maka di Posko Penanggulangan krisis ini setiap hari disiagakan beberapa truk yang siap berangkat untuk menjemput dan menyelamatkan warga yang memerlukan bantuan diungsikan. Pelayanan jalur komunikasi baik melalui pesawat telephon, Handphone dan sarana komunikasi udara (orari) untuk memberikan kemudahan warga masyarakat memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk menyampaikan informasi dan setiap perkembangan yang terjadi karena dalam situasi konflik yang terjadi banyak isu dan informasi yang memprovokasi warga masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu konflik berdarah.

c. Bantuan Pasukan TNI dan Personil Instansi lain

Dalam menangani konflik yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat Polres memperoleh bantuan pasukan dari anggota TNI sebanyak 1.289 personil TNI dari Yonif 412 Kostrad dan Yonif Linud 700. Bantuan pasukan ini sangat diperlukan karena luasnya wilayah dan besarnya masalah yang dihadapi dalam menangani konflik tersebut tidak mungkin Polres Kotawaringin Barat hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Dengan adanya bantuan pasukan TNI dalam status BKO ini maka pasukan berada dalam komando dan kendali Kapolres yang dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari tindakan koordinasi antar Muspida. Mekanisme pengerahan pasukan diatur sedemikian rupa sehingga terjadi peralihan komando dengan baik yaitu dengan cara setiap kali Kapolres memerlukan bantuan pasukan TNI maka permintaan diajukan melalui Bupati sebagai Kepala Wilayah dan Koordinator Muspida untuk memberikan pasukan kepada Kapolres. Setelah Kapolres menerima pasukan maka kegiatan operasional selanjutnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kapolres untuk mengendalikannya. Pelaksanaan operasional keamanan dengan langkah-langkah pendekatan demikian perlu dilakukan demi tercapainya koordinasi dan pencapaian tujuan yang efektif sehingga tidak perlu mengedepankan kewenangan yang kadang-kadang justru dapat menimbulkan konflik diantara pejabat yang efeknya bisa berlanjut kepada para pelaksana dilapangan.

d. Dukungan Materil / Logistik

Dalam setiap operasi kepolisian yang melibatkan personil untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat telah dialokasikan dana operasional secara khusus di luar dana operasi rutin kepolisian. Tetapi kadang-kadang karena perkembangan situasi yang tidak menentu seperti konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah ini dana yang telah dialokasikan tersebut tidak mencukupi. Dalam operasi penanganan konflik di kabupaten Kotawaringin Barat ini kebutuhan logistik pasukan disamping telah dicukupi oleh dana operasi yang telah disediakan juga mendapat dukungan dari Bupati selaku kepala wilayah. Bantuan Bupati tersebut dalam bentuk pemberian uang saku kepada setiap personil

pasukan yang terlibat dalam pengamanan yang besarnya kurang lebih sekitar RP. 15. 000,- / orang perhari. Dengan adanya dukungan ini setidaknya-tidaknya sudah dapat membantu Kapolres untuk mengatasi kebutuhan dana operasi sehingga dapat berkonsentrasi untuk memikirkan langkah-langkah pengamanan masyarakat. Kepedulian seorang Kepala Wilayah seperti ini tidak dapat timbul dengan sendirinya tanpa adanya upaya konkret yang telah dilakukan oleh Kapolres untuk membuktikan bahwa masalah-masalah keamanan wilayah sangat diperlukan dalam mensejahterakan masyarakat. Dalam otonomi daerah seperti saat ini maka tindakan konkret semacam inilah yang harus dilakukan oleh setiap Kapolres sehingga Kepala daerah akan dapat memberikan alokasi dana keamanan kepada Kapolres untuk meningkatkan kegiatan operasional Polres dalam menciptakan kamtibmas yang mantap di wilayahnya.

2. Preemptif

Kegiatan preemptif dilakukan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, kegiatan ini dilakukan dengan banyak memberikan informasi dan membuka komunikasi yang selebar-lebarnya dengan masyarakat secara aktif dan proaktif, hal ini terutama ditujukan untuk menangkal berbagai isu dan provokasi yang sangat deras berkembang dalam masyarakat yang disebarkan oleh berbagai sumber dengan motivasi tertentu untuk menimbulkan situasi ketidak tenangan masyarakat. kegiatan *preemptive* yang dilakukan oleh Polres Kobar adalah dalam bentuk :

- a. Membuat Pusat Informasi di Polres Kobar yang dipimpin oleh Pamapta dan dikendalikan langsung oleh Kapolres, Pusat informasi ini melaksanakan tugas selama 24 jam terus menerus bertempat di ruang pelayanan masyarakat yang berkewajiban menerima laporan, pengaduan dan berbagai informasi baik dari masyarakat maupun dari berbagai sumber lainnya untuk segera dilakukan antisipasi. Keberadaan Pusat Informasi ini sangat efektif sekali karena dapat segera memberikan jawaban dan penjelasan kepada masyarakat baik yang datang sendiri ke Kantor Polisi, melalui telephone maupun pesawat radio Orari.
- b. Melakukan komunikasi aktif kepada warga masyarakat yang menjadi pelapor / korban kejahatan dan keluarga para tersangka,

dengan memberitahukan perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan, dan menyampaikan kesulitan / hambatan yang dialami bila perkara yang dilaporkan belum terungkap / tertangkap / belum tuntas. Sedangkan terhadap keluarga tersangka diberikan informasi dan pengertian alasan hukum pelaku ditangkap dan ditahan, memberikan jaminan keselamatan tersangka yang ditahan. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan baik dari pelapor maupun pihak tersangka jangan sampai timbul penilaian Polisi melakukan diskriminasi dalam penanganan perkara karena belum tuntasnya penyidikan yang dilakukan, untuk pihak tersangka untuk menghindari ketidakpuasan keluarga tersangka sehingga melakukan provokasi massa untuk melakukan pembalasan terhadap pelapor maupun terhadap Polisi. Tindakan ini sangat efektif untuk meredam isu yang berkembang selama ini dimana Polisi dinilai diskriminatif dalam melakukan penyidikan dimana lebih berpihak kepada orang Madura dengan alasan kalau orang Madura menganiaya orang Dayak tidak pernah ditahan, sedangkan kalau orang Dayak pasti ditahan. Hal ini sangat rawan karena dapat menambah kecemburuan dan kebencian orang Dayak terhadap Madura, sehingga dengan cara demikian maka Polres Kobar dapat mengurangi *complain* masyarakat Dayak dalam kegiatan penyidikan.

- c. Melakukan pembinaan dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dari tiap sukubangsa yang ada dimana tiap sukubangsa telah membentuk ikatan kerukunan sukubangsa, sehingga dapat mempermudah komunikasi dan penyebaran berbagai informasi yang berkembang guna menangkal informasi yang menyesatkan. Disamping itu juga untuk menekankan kepada masing-masing ikatan sukubangsa tersebut untuk mengarahkan warganya agar dapat menciptakan kerukunan dan hidup berdampingan serta saling menghargai. Hal ini terbukti efektif ketika team peneliti menginginkan wawancara dengan seluruh komponen sukubangsa yang ada di Kobar maka dalam waktu singkat dapat terkumpul, sehingga dapat saling memberikan informasi bahkan disusun rancangan rekonsiliasi antar sukubangsa yang ada di Kobar, dimana tokoh-tokoh IKAMA bersedia untuk membuat pernyataan sesuai dengan keinginan dari warga sukubangsa yang lain untuk menciptakan rekonsiliasi.

3. Preventif

Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah Kobar dan mengantisipasi penanganan pengungsi suku Madura yang ingin meninggalkan Kalteng baik yang berasal dari Kobar sendiri maupun limpahan dari kabupaten lain. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan Sarana Angkutan dan Transit Pengungsi

Untuk mengantisipasi adanya warga Madura yang ingin mengungsi maka setiap hari di Polres Kobar disiagakan 10 (sepuluh) unit truk untuk menjemput dan mengangkut pengungsi ke tempat transit / pelabuhan, sehingga petugas dapat cepat bertindak untuk menghindari jatuhnya korban yang tidak diinginkan bila sewaktu-waktu terjadi konflik.

b. Pembuatan Pos Pengamanan

Untuk mengantisipasi penyusupan orang dari luar Pangkalan Bun yang ingin memprovokasi dan menimbulkan terjadinya konflik di Kobar maka dilakukan penjagaan dalam bentuk pembagian wilayah Kobar dalam 5 sektor pengamanan yang dibagi dalam 33 sub sektor, dalam setiap sektor terdiri dari beberapa pos pengamanan yang seluruhnya terdapat 40 pos pengamanan yang tersebar di sepanjang jalur keluar masuk wilayah Kobar melalui darat dan sungai serta penjagaan pada perbatasan kabupaten Kotawaringin Barat dengan wilayah lainnya yang sangat rawan dilakukannya penyusupan dari warga lain dari luar Kotawaringin Barat yang ingin membuat kerusuhan. Personil yang dilibatkan sebanyak 1.569 orang terdiri dari 1.289 TNI dan 280 Polri. Tugas dari tiap-tiap pos adalah melakukan pemeriksaan setiap orang dan kendaraan yang masuk ke wilayah Kotawaringin Barat dengan melakukan pemeriksaan identitas, tujuan dan barang yang dibawa. Kegiatan ini sangat efektif karena mampu mengantisipasi penyusupan dari orang luar yang sengaja ingin membuat wilayah Kobar rusuh, cukup banyak orang dan kendaraannya yang dikembalikan keluar dari wilayah Kobar karena tidak jelas tujuannya, bahkan telah disita beberapa senjata tajam dan tombak yang diikatkan pada bagian bawah kendaraan yang digunakan.

Disamping penjagaan oleh petugas keamanan, warga

masyarakat juga melakukan penjagaan disekitar lingkungan perumahan mereka. Terhadap penjagaan yang dilakukan oleh warga ini maka Polisi melakukan kunjungan dan bahkan berjaga bersama dengan warga masyarakat, untuk mengantisipasi adanya provokasi dari penyebar isu yang tidak benar. Hal ini pernah terjadi dan dialami team peneliti ketika dalam perjalanan dari Pangkalan Bun menuju Sampit dimana sepanjang jalan menuju wilayah Sampit tidak dilakukan penjagaan oleh aparat keamanan tetapi dijaga oleh warga, ketika team melewati pos warga Dayak mereka melakukan pemeriksaan dengan menghunus mandau dan tombak mereka dan tidak seperti biasanya, setelah ditanyakan ternyata mereka mendapat informasi dari pengendara mobil sebelum team peneliti bahwa terjadi pembantaian orang Dayak oleh orang Madura di Pangkalan Bun, padahal isu tersebut adalah tidak benar. Memang polisi tidak mungkin akan bisa melarang warga yang melakukan penjagaan, dan telah disarankan oleh team agar Polres Kotim menertibkan Pos penjagaan warga tersebut dengan cara melibatkan personil Polri dan TNI berjaga bersama warga sehingga dapat diantisipasi peyebaran isu oleh pengguna jalan yang melewati pos tersebut dan menghindari tindakan arogan dari warga terhadap pengguna jalan yang dapat menimbulkan kesalah pahaman. *(ternyata saran tersebut tidak dilaksanakan dan telah terjadi konflik antara anggota Brimob dengan warga yang berjaga di pos setelah team kembali ke Jakarta yang mengakibatkan korban jiwa baik Brimob maupun warga masyarakat).*

c. Patroli Gabungan

Patroli ini dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan anggota Polri, TNI, warga masyarakat dari berbagai suku secara bergantian. Tujuan dari patroli ini disamping untuk mengantisipasi berbagai kejahatan dan konflik yang terjadi juga menunjukkan kepada warga masyarakat bahwa kerukunan antar sukubangsa di wilayah Kobar tetap terbentuk dengan adanya kegiatan tersebut. Disisi lain bila ada konflik yang melibatkan salah satu sukubangsa maka anggota patroli dari sukubangsa yang terlibat konflik tersebut dapat bersama-sama dengan petugas ikut menetralsir situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang besar.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4. Represif

Tindakan represif dilakukan bilamana terjadi tindak pidana / kejahatan yang terjadi di wilayah Kobar. Dalam melakukan penyidikan perkara pidana maka Polres Kobar telah berupaya bertindak secara tegas dan proporsional serta obyektif, hal ini sangat besar sekali dampaknya terhadap upaya menghilangkan image negatif yang telah berkembang dimasyarakat bahwa polri bertindak diskriminatif terhadap suku Dayak dan lebih membela suku Madura dalam kegiatan penyidikan. Sehingga strategi yang diterapkan dalam melakukan penyidikan adalah dengan selalu memberikan informasi kepada pelapor tentang perkembangan penyidikan yang dilakukan berikut hambatan-hambatan yang ditemui, penyidik tidak melakukan praktek kolusi maupun bentuk penyimpangan lain yang tidak dibenarkan dalam penyidikan. Bilamana terjadi tindak pidana yang melibatkan dua atau lebih warga sukubangsa maka penyidikan dilakukan secermat dan seobyektif mungkin serta secara transparan untuk mencegah terjadinya penilaian keberpihakan Polres terhadap salah satu suku yang berperkara. Dengan cara demikian walaupun masih terdapat keluhan dari masyarakat tentang penyidikan yang dilakukan Polres Kobar tetapi sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan yang terjadi di Polres lain. Dari data yang diperoleh kejahatan yang terjadi selama tahun 2000 adalah sebagai berikut

No	Bulan	Pelaku – Suku yang terlibat					
		Madura	Banjar	Melayu	Jawa	Batak	Dayak
1	Januari	3		3	1		1
2	Februari	12		5	2	1	
3	Maret	4	2	2	3		
4	April	5	2		4	1	
5	Mei		2	8	2		
6	Juni		3	10	4		1
7	Juli	2	5		2		
8	Agustus	1	1	1	1	2	
9	September	4	3	4	1	1	
10	Oktober	5	5	4	2	1	
11	November	1	2	2			
12	Desember	3	2	5	1		
	Jumlah	40	27	44	23	6	2

Sumber : Polres Kobar

Dari data pelaku yang terlibat tersebut terlihat bahwa yang paling banyak adalah dari suku Melayu dan kedua suku Madura, disamping itu terdapat sukubangsa lain yang terlibat dalam berbagai tindak pidana. Oleh karena itu dalam penanganan tindak pidana perlu dilakukan seobyektif mungkin demi mencegah terjadinya penilaian keberpihakan terhadap salah satu suku.

Untuk meredakan berbagai isu dan kecurigaan warga suku non Madura terhadap suku Madura yang dicurigai menyimpan bahan peledak di rumah mereka untuk persiapan penyerangan terhadap suku non Madura maka Polres melakukan penggeledahan rumah-rumah warga Madura dari pintu ke pintu (*door to door*) yang dilakukan dengan melibatkan instansi lain dan warga perwakilan tokoh dari warga sukubangsa lain dan warga Madura untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. Tindakan ini dilakukan untuk menghilangkan kecurigaan dan obyektifitas tindakan dari aparat kepolisian. Dengan demikian maka timbul sikap untuk saling mempercayai dan menghilangkan rasa saling curiga yang berpotensi terjadinya konflik.

Penutup

Konflik antar suku bangsa yang terjadi di Kalteng yang disebabkan oleh adanya benturan / konflik kebudayaan antara suku Madura dengan Dayak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap timbulnya konflik serupa di wilayah lain, sehingga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya konflik baru. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesamaan perasaan orang Dayak dan sukubangsa yang lainnya yang tidak menyukai, telah disakiti dan dilecehkan oleh orang Madura yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat setempat serta dianggap melecehkan budaya masyarakat setempat, seperti halnya yang terjadi di wilayah kabupaten Kotawaringin Barat, yang dapat diantisipasi oleh aparat keamanan bersama-sama dengan Muspida sehingga tidak terjadi konflik sosial berdarah seperti di daerah lainnya.

Polres Kotawaringin Barat telah mampu menangani konflik antar sukubangsa di wilayahnya dengan baik sehingga tidak sampai terjadi konflik berdarah seperti halnya di wilayah lain, karena :

1. Adanya kerjasama, koordinasi dan kekompakan antar Muspida dalam menangani setiap permasalahan secara proporsional dan yang penuh dengan rasa tanggung jawab demi kepentingan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dilakukan obyektif dan tidak berpihak.
2. Kemampuan menggalang tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing sukubangsa sehingga menjadi sarana forum komunikasi yang sangat

efektif dalam pembinaan kerukunan antar sukubangsa yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Penerapan manajemen operasional Polri dalam melakukan penanggulangan konflik mulai dari perencanaan operasi, penyusunan kekuatan, penyusunan strategi operasi, pelaksanaan dan pengendalian operasi yang dilakukan dengan baik sehingga dapat efektif dalam penanganan konflik yang terjadi dengan penerapan strategi pemolisian yang cukup baik mulai dari kegiatan preemtif, preventif, dan represif yang telah dilakukan secara proporsional.
4. Dilakukan komunikasi yang aktif dan terbuka dengan masyarakat untuk saling memberi dan menerima informasi yang penting sehingga sangat efektif sebagai sarana dalam pembinaan kamtibmas dan menangkal isu dan informasi yang memprovokasi masyarakat.
5. Pelaksanaan penyidikan perkara yang dilakukan secara obyektif dan transparan telah mampu mengeliminir ketidak puasan masyarakat terhadap Polri dan menghilangkan image negatif dimasyarakat adanya tindakan Polri yang diskriminatif.

Acuhan Kepustakaan

Butler

1992 *Police Management*. Vermont USA: Darnouth PCL.

Cordner Gary, Gainess Larry

1996 *Police Operation*. Cincinati: Anderson Publisng.

Kartodipoero S

1963 *Kaharingan*. Bandung: Sumur Bandung.

Kep / 187 / 1998

Manajemen Operasional Poiri.

LMMDD-KT

2001 *Usulan Penyelesaian Jalan Tengah-Islah / Rekonsiliasi dari Masyarakat Daerah Kalimantan Tengah*, LKMMDD-Kalteng.

Polres Kobar

Laporan Kesatuan September 2000.

Suparlan P

2003 *Multikulturalisme dan Kebudayaan*, *Majalah Transformasi* Vol. 3 No. 1

Usop KMA

1996 *Pakat Dayak*, Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Batang Garing, Palangka Raya.